

## **PENGUATAN LEGALITAS UMKM MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN DI MEDOKAN SEMAMPIR**

**Raka Wibawa Perkasa, Sishadiyati, Wiwin Priana P**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
*chyntiaraka4@gmail.com*

### **Abstract**

This study aims to analyze the contributions of students regarding the enhancement of legalities, specifically in the Medokan Semampir area, Sukolilo District, Surabaya City, through the student internship program at the Small and Medium Enterprises Cooperative, and Trade Office of Surabaya City. Direct assistance is the method used as an aspect of enhancing legalities, such as the Business Identification Number (NIB), Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT), and halal certification. The results show that student contributions significantly affect compliance and the enhancement of legalities in Medokan Semampir. The conclusion of this study indicates that the student internship program plays an important role in improving performance and supporting the legalities of UMKM in Medokan Semampir.

*Keywords: legalities, MSME, internship, assistance.*

### **Abstrak**

Penguatan legalitas merupakan strategi yang penting dalam peningkatan UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi mahasiswa terkait peningkatan legalitas khususnya, di daerah Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, melalui program magang mahasiswa di Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya. Pendampingan langsung merupakan metode yang digunakan sebagai aspek peningkatan legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan sertifikat halal. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa mempengaruhi secara signifikan akan kepatuhan dan peningkatan legalitas di Medokan Semampir. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program magang mahasiswa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja, serta dukungan dalam hal legalitas UMKM di Medokan Semampir.

*Keywords: legalitas, UMKM, ,magang, pendampingan.*

### **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikenal dengan singkatan UMKM, memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Berdasarkan data dari kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60% dan penyerapan dalam

tenaga kerja di Indonesia sebesar 97%. Walaupun kontribusi yang sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, masih terdapat banyak sekali pelaku usaha yang mengalami kendala dalam hal legalitas. Legalitas usaha, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), dan Sertifikat Halal, merupakan syarat yang sangat penting sebagai pembuktian bahwa

pelaku usaha dapat beroperasi secara legal dan bersaing di pasar. Pentingnya legalitas usaha, tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberikan kemudahan berusaha, termasuk kemudahan dalam izin berusaha serta persyaratan legalitas bagi UMKM (Ribka, 2023).

NIB memiliki fungsi sebagai pengakuan yang sah dalam berusaha, yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission), yang memudahkan proses perizinan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018). Di lain sisi, SPP-IRT, merupakan izin yang menjelaskan bahwa produk pangan industri rumah tangga tersebut dijamin kualitas serta keamanannya oleh pemerintah (Badan POM, 2022). Sertifikasi Halal juga menjadi semakin penting, khususnya bagi pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman untuk menyediakan kebutuhan konsumen yang mengutamakan produk halal (My et al., 2023).

Tetapi, masih banyak ditemukan pelaku UMKM (khususnya yang berada di Medokan Semampir Kota Surabaya) yang masih belum / kurang dalam memenuhi persyaratan standar legalitas yang diperlukan. Hal ini dikarenakan, kurangnya pengetahuan dan akses yang kurang memadai terkait legalitas usaha. Situasi ini memerlukan adanya penanganan yang dapat membantu dalam pemenuhan aspek legalitas tersebut. Oleh karena itu, program magang mahasiswa (di Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya) yang mengharuskan dalam pendampingan kepada UMKM, menjadi solusi yang optimal untuk membantu pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas usaha mereka. Dengan adanya program

ini, mahasiswa dapat memberikan edukasi, bimbingan, serta dukungan teknis kepada pelaku usaha / pelaku UMKM, sehingga mereka dapat lebih memahami dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan legalitas usaha (NIB, SPP-IRT, Sertifikasi Halal).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kontribusi pendampingan mahasiswa dalam memperkuat legalitas usaha bagi para pelaku UMKM di Medokan Semampir Kota Surabaya melalui pengurusan NIB, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku usaha / UMKM.

## **METODE**

Bagian Kegiatan dalam program magang pendampingan yang dilakukan mahasiswa dilakukan pada tanggal 30 september 2024 – 3 januari 2024. Lokasi pada program magang pendampingan berada di Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Awalnya mahasiswa mendapatkan data UMKM yang berada di Medokan Semampir dari Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan program magang pendampingan ini, diantaranya :

1. Tahap yang dilakukan pertama kali adalah melakukan perizinan kepada perangkat daerah atau instansi setempat (perizinan dilakukan melalui kantor Kecamatan Sukolilo, kemudian berlanjut di kantor Kelurahan Medokan Semampir), sebagai konfirmasi akan dilakukannya program

magang pendampingan yang dilakukan Mahasiswa.

2. Tahap kedua dalam pelaksanaan, yaitu observasi atau melakukan survei kepada pelaku UMKM di Medokan Semampir dengan data yang telah diberikan, ini merupakan tindakan yang dilakukan sebagai penelusuran dan perizinan terhadap pelaku UMKM yang akan didampingi. Dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sendiri mewajibkan minimal 10 UMKM yang harus didampingi. Pada survei ini mahasiswa melakukan perizinan serta pendataan dengan menggunakan formulir yang telah disiapkan dari Dinas untuk mendata UMKM di Medokan Semampir.

3. Tahap ketiga adalah pelaksanaan pendampingan. penulis memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai NIB, SPP-IRT, serta Sertifikat Halal dan menawarkan bantuan terkait pembuatannya. Untuk pelaku UMKM yang belum memiliki NIB akan didaftarkan melalui website OSS (Online Single Submission) sebagai pendaftaran produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Untuk UMKM yang belum memiliki surat keterangan penyuluhan dari dinas kesehatan (sebagai syarat pemenuhan komitmen SPP-IRT) akan didaftarkan terlebih dahulu untuk penyuluhannya.



**Gambar 1: Tahapan-tahapan dalam kegiatan pendampingan**

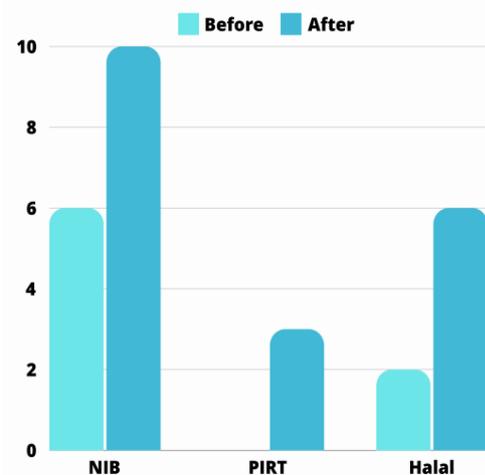
Dengan demikian, rangkaian Pendampingan terhadap Pelaku UMKM yang dilakukan Mahasiswa dapat meningkatkan penguatan legalitas, dan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM khususnya

yang berada di Medokan Semampir, Kota Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan legalitas UMKM melalui program pendampingan di Medokan Semampir diawali dengan tahap perizinan. Penulis yang saat itu memposisikan diri sebagai mahasiswa magang, mengawali proses pendampingan dengan melakukan perizinan kepada otoritas atau instansi daerah setempat sebelum terjun ke lapangan / survey. Tahap ini meliputi temu sapa serta melakukan perizinan terkait program magang yang dilakukan mahasiswa melalui pendampingan kepada UMKM Medokan Semampir. Dalam proses ini, penulis berinteraksi dengan berbagai pihak pengurus kelurahan, untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari program pendampingan yang akan dilaksanakan serta mendapatkan informasi mengenai UMKM di Medokan Semampir. Perizinan ini dilakukan di kantor kelurahan Medokan Semampir, dan perizinan ini telah disetujui oleh aparat kelurahan, yang menunjukkan dukungan positif dari pemerintah setempat terhadap inisiatif ini. Selain itu, dukungan dari pihak kelurahan juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap program ini, sehingga mereka lebih terbuka untuk berpartisipasi dan menerima bantuan yang diberikan.





**Gambar 4: Data UMKM Medokan Semampir sebelum dan sesudah pendampingan**

Selanjutnya, ada juga tahap kepengurusan yang dilakukan mengenai NIB, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal. Awalnya, untuk NIB, penulis membantu pelaku UMKM dalam mengakses dan membuat akun sistem Online Single Submission (OSS), serta memastikan semua persyaratan dokumen pendukung telah lengkap. Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Email, dan nomor telepon aktif pelaku UMKM. Kemudian penulis mengarahkan dalam pengisian data untuk pembuatan NIB. Proses ini tidak hanya mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan NIB, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya legalitas usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah yang dapat membantu pertumbuhan usaha mereka (Irawaty, 2022).



**Gambar 5: Pembuatan legalitas NIB bersama pelaku UMKM Medoka Semampir**

Kedua, dalam pengurusan SPP-IRT, penulis memberikan bimbingan mengenai standar keamanan pangan yang harus dipenuhi, serta menjelaskan produk apa saja yang dapat dibuatkan SPP-IRT-nya. Awalnya, untuk SPP-IRT, penulis mendaftarkan pelaku UMKM untuk penyuluhan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai tahap komitmen SPP-IRT. Dalam penyuluhan ini, pelaku UMKM diberikan bimbingan mengenai syarat yang diperlukan, termasuk prosedur pendaftaran dan pentingnya menjaga kualitas produk pangan yang dihasilkan. Pengetahuan ini sangat penting, mengingat keberadaan SPP-IRT tidak hanya berfungsi sebagai izin, tetapi juga sebagai jaminan bagi konsumen bahwa produk yang mereka beli aman untuk dikonsumsi (Niki & Appin, 2023). Setelah penyuluhan dilakukan, penulis mendaftarkan produk yang akan dibuatkan legalitas SPP-IRT nya melalui website Online Single Submission (OSS), kemudian ke website BPOM SPP-IRT. Dalam mendaftarkan produk ini, tidak lupa penulis masukkan data-data pelaku usaha yang diperlukan. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa produk

terdaftar secara resmi, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada pelaku UMKM bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.



**Gambar 6: Pembuatan legalitas SPP-IRT melalui Onlin Single Submission (OSS), dan POM SPP-IRT**

Terakhir, untuk sertifikasi halal, penulis berperan dalam menjelaskan proses dan syarat yang harus dipenuhi, serta membantu pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal. penulis juga berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dan instansi pemerintah, khususnya Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya.



**Gambar 7: Pembuatan legalitas halal**

Berikut adalah hasil kontribusi penulis sebagai mahasiswa yang mendampingi UMKM : yang pertama tingkat pemahaman pelaku UMKM / pelaku usaha : sebagian besar pelaku UMKM yang terlibat dalam pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha. Sebelum dilakukannya pendampingan, banyak sekali pelaku UMKM yang kurang

mengerti atau tidak mengetahui prosedur pembuatan legalitas sendiri (NIB, SPP-IRT, dan Sertifikat Halal). Namun, setelah diberikannya edukasi dan pemahaman melalui pendampingan, mereka lebih memahami manfaat legalitas usaha. Proses pengurusan yang lebih mudah : program pendampingan membantu memudahkan para UMKM dalam mengisi formulir serta menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan legalitas NIB, SPP-IRT, dan Sertifikat Halal. Mahasiswa berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dan instansi pemerintah.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa program pendampingan yang dilakukan di Medokan Semampir berhasil memperkuat legalitas UMKM melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Proses dimulai dengan perizinan dari instansi setempat, yang menciptakan dukungan positif dari pemerintah dan meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap program ini. Melalui survei langsung, penulis dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dan memberikan edukasi yang relevan mengenai NIB, SPP-IRT, dan Sertifikat Halal. Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, serta kemudahan dalam proses pengurusan dokumen-dokumen tersebut. Dengan bantuan mahasiswa, pelaku UMKM tidak hanya berhasil mendapatkan NIB dan SPP-IRT, tetapi juga sertifikasi halal, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan usaha mereka. Program ini tidak hanya memberikan manfaat administratif, tetapi juga membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan yang diperlukan

untuk beradaptasi dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Secara keseluruhan, inisiatif ini menunjukkan potensi besar dari kolaborasi antara mahasiswa dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Surabaya. Terima kasih atas dukungan, bimbingan, dan kesempatan yang telah diberikan selama proses magang ini. Pengalaman di dinas ini telah memberikan penulis wawasan yang berharga mengenai pengembangan UMKM dan pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, L. R., & Laily, D. W. (2023). PEMBERDAYAAN UMKM KOPI MELALUI PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI DESA PUSPO. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 273-278.
- Felicia Mingkid, R. A. (2023). yang berisi tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberikan kemudahan berusaha, termasuk kemudahan dalam izin berusaha serta persyaratan legalitas bagi UMKM. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, 1-9. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46571>
- Indonesia, U. U. (2020). *UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKMenegenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 35-49. doi:<https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495K>. K. d. M. UKM, ". T. (n.d.).Menengah, K. K. (2021). *Laporan Tahunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Permata, M. S., Zunaidi, A., Hermadiani, F., & Chumairo, M. (2023). Resilien Ekonomi Umat: Tantangan dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 352-365. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1044>
- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *EKONOMIKA SYARIAH journal of economic studies*, 147-162. doi:<https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3591>
- Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan

Pendaftaran NIB &P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumh Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 184-192. doi:<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i1>

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 386-394. doi:<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>